BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Bandung

3.1.1 Letak Geografis Kota Bandung

Sehubungan dengan judul Skripsi mengenai Sistem Informasi Geografis, maka penulis menjelaskan letak geografis Kota Bandung, yaitu secara geografis Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara $107^0 – 43^0$ Bintang Timur dan 6^0 00 – 6^0 20 Lintang Selatan. Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 Meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 Meter di atas permukaan laut.

Wilayah Kota Bandung di bagian Selatan permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah Kota Bandung bagian Utara berbukit-bukit, sehingga merupakan panorama yang indah. Adapun dengan batas-batas administratif Kota Bandung, sebagai berikut :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung.
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi.
4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Kota Bandung sebagai bagian dari Metropolitan Bandung harus mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh masyarakat kota yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdisiplin.

Lokasi Kota Bandung cukup strategis baik dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan, hal ini disebabkan:

1) Kota Bandung terletak pada poros pertemuan poros jalan raya :
    a. Barat Timur yang memudahkan hubungan dengan Ibukota Negara.
    b. Utara Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang dan Pangalengan).
2) Letak yang tidak terisolasi serta dengan komunikasi yang baik akan memudahkan aparat keamanan untuk bergerak ke setiap penjuru.

Iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk dengan temperatur rata-rata $23,5^0$ C, dan curah hujan rata-rata 200,4 mm serta jumlah hujan perhari rata-rata 21,3 hari perbulan.

3.1.2 Jumlah Penduduk Kota Bandung

Data jumlah penduduk Kota Bandung yang merupakan penduduk maupun pendatang, yang diperoleh berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung pada tanggal 01 Juni 2010.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatannya (Km2)
Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2009

NO	Kecamatan	Penduduk (jiwa)			Luas (Km^2)	Kepadatan (jiwa/Km^2)		
		L	P	L + P		L	P	L + P
1	Bandung Kulon	62.414	64.446	126.860	6,48	9.631,79	9.945,37	19.577,16
2	Babakan Ciparay	63.622	62.492	126.114	7,96	7.992,71	7.850,75	15.843,47
3	Bojongloa Kaler	58.393	57.197	115.590	3,03	19.271,62	18.876,90	38.148,51
4	Bojongloa Kidul	39.363	37.486	76.849	6,27	6.277,99	5.978,63	12.256,62
5	Astanaanyar	35.594	36.253	71.847	2,89	12.316,26	12.544,29	24.860,55
6	Regol	38.062	39.101	77.163	4,3	8.851,63	9.093,26	17.944,88
7	Lengkong	35.950	37.213	73.163	5,92	6.072,64	6.285,98	12.358,61
8	Bandung Kidul	22.086	22.432	44.518	4,32	5.112,50	5.192,59	10.305,09
9	Margacinta	52.570	53.494	106.064	10,9	4.822,94	4.907,71	9.730,64
10	Rancasari	31.775	32.546	64.321	13,18	2.410,85	2.469,35	4.880,20
11	Cibiru	39.542	39.656	79.198	10,61	3.726,86	3.737,61	7.464,47
12	Ujungberung	38.574	38.096	76.670	10,35	3.726,96	3.680,77	7.407,73
13	Arcamanik	31.252	31.137	62.389	8,8	3.551,36	3.538,30	7.089,66
14	Cicadas	49.037	49.386	98.423	8,67	5.655,94	5.696,19	11.352,13
15	Kiaracondong	61.985	62.767	124.752	3,4	18.230,88	18.460,88	36.691,76
16	Batununggal	59.601	59.621	119.222	5,27	11.309,49	11.313,28	22.622,77
17	Sumur Bandung	19.342	18.889	38.231	6,13	3.155,30	3.081,40	6.236,70
18	Andir	49.787	50.235	100.022	3,71	13.419,68	13.540,43	26.960,11
19	Cicendo	44.680	45.762	90.442	6,87	6.503,64	6.661,14	13.164,77
20	Bandung Wetan	18.154	18.530	36.684	3,39	5.355,16	5.466,08	10.821,24
21	Cibeunying Kidul	54.830	53.805	108.635	4,62	11.867,97	11.646,10	23.514,07
22	Cibeunying Kaler	35.879	33.923	69.802	4,32	8.305,32	7.852,55	16.157,87
23	Coblong	61.258	56.273	117.531	7	8.751,14	8.039,00	16.790,14
24	Sukajadi	49.688	50.145	99.833	5,92	8.393,24	8.470,44	16.863,68
25	Sukasari	38.004	38.341	76.345	6,28	6.051,59	6.105,25	12.156,85
26	Cidadap	24.557	24.042	48.599	6,11	4.019,15	3.934,86	7.954,01
∑		**1.115.999**	**1.113.268**	**2.229.267**	**166,7**	**6.694,66**	**6.678,27**	**13.372,93**

Sumber : BPS, Susenas 2009 diolah

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk di Kota Bandung yang mencapai 2.229.267 jiwa /Km^2 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.115.999 jiwa serta jumlah penduduk wanita sebanyak 1.113.268 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk/Km^2 mencapai 13.372,93 jiwa, dengan tingginya jumlah

penduduk yang ada di Kota Bandung bukanlah hal yang mustahil tingkat kejahatan relatif tinggi.

3.1.3 Tingkat Kriminalitas di Kota Bandung

Seiring dengan meningkatnya ancaman berdasarkan perkembangan trend global, Kota Bandung juga menghadapi tantangan dalam hal tingkat kriminalitas, seperti (1) kasus transfer uang lewat sandi computer (*computer crime, derivative transactions*), korupsi, kolusi dan konspirasi jahat yang sulit dibuktikan secara materiil, meskipun nyata-nyata terjadi; (2) pasar gelap *(black marke*t) barang-barang terlarang, seperti obat-obat terlarang (*drugs*), makanan dan minuman melalui kemasan dan peredaran non-konvensional; (3) *debt collector*, backing perjudian besar, pembuangan limbah 3B, teror, agitasi dan insinuasi; (4) *urban renewal* (pemugaran daerah perkotaan) juga tidak sepi dari *backing* untuk menekan ganti rugi, misalnya lewat kebakaran yang direkayasa; (5) perampokan bank dan penculikan anak (*kid-nap)* yang dilakukan melalui suatu jaringan organisasi; (6) kejahatan asuransi (*insurance crime*), antara lain karena kalah bersaing maka pabrik, gudang, toko atau mall berikut barangnya yang sudah diasuransikan dinyatakan seolah-olah mengalami musibah kebakaran, hal semacam ini juga bisa dilakukan oleh orang lanjut usia yang berasuransi supaya yang menjadi ahli waris dapat secepatnya menerima santunan (dana) dari perusahaan asuransi; (7) pemalsuan merek dagang terkenal dan pembajakan hak paten adalah bentuk kejahatan bermata dua, yakni memalsu dan menipu

konsumen; (8) penggelapan pajak, termasuk pemalsuan restitusi pajak merupakan kejahatan dibidang ekonomi yang marak dalam investasi dan perdagangan bebas; (9) penyalahgunaan kartu kredit (*credit card*), pencurian pulsa telepon; (10) kejahatan *money laundry* (pemutihan uang haram) lewat bank transfer merupakan kasus pelik untuk diatasi; (11) pelecehan *sex* dan *child abuse* (penyiksaan anak), kejahatan yang bersumber dari tekanan psikologis akibat kerja berat karena diburu waktu, dan (14) berkembangnya pola konsumsi tinggi yang bersifat massal karena pada umumnya masyarakat masih rentan terhadap *demonstration effects*.

3.2 Markas Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung

3.2.1 Sejarah Singkat Mapolwiltabes Bandung

Bangunan Gedung Markas Polwiltabes (Mapolwiltabes) Bandung yang bertempat di Jl. Merdeka No. 16, 18 dan 20 Bandung ini didirikan pada tahun 1866, dulunya berfungsi sebagai Sekolah Guru (*Kweekschool Voor Inlandsche Onderwijzers*) yang didirikan atas inisiatif seorang kewarganegaraan Belanda, bernama K.F. Hole sebagai Administratur Perkebunan Teh Waspada di Gunung Cikuray, Bayongbong, Garut. Di sekolan inilah pernah belajarnya tokoh-tokoh nasional, seperti Abdulharis Nasution, Otto Iskandardinata dan yang lainnya.

Dilihat dari sejarah berdirinya Polwiltabes Bandung, dimulai pada tahun 1966, dimana belum adanya polsekta-polsekta, Kepolisian di Bandung pada tahun tersebut berdiri dengan nama ”Komtabes-86 Bandung” dengan pembagian wilayah hukum pada saat itu terdiri dari :

1. Seksi I di Jl. Dalam Kaum, Alun-alun Bandung
2. Seksi II di Jl. Sawung Galing Bandung
3. Seksi III di Jl. Pasirkaliki Bandung
4. Seksi IV di Jl. Asia Afrika (Simpang Lima) Bandung

Pada tahun 1970, nama Komtabes-86 Bandung diganti namanya menjadi ”Poltabes Bandung” dengan pembagian wilayah hukum pada saat itu terdiri dari 16 (enam belas) Polsekta, yaitu : Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojong Loa, Astana Anyar, Andir, Cicendo, Sukajadi, Sukasari, Cidadap, Cihapit, Coblong, Regol, Lengkong, Batununggal, Kiaracondong dan Cibeunying.

Setelah 18 tahun kemudian, dimana Kotamadya Bandung mengalami pemekaran, nama Poltabes Bandung dirubah menjadi “Polwiltabes Bandung” (Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung), yaitu pada tahun 1988 dan membawahi tiga Kepolisian Resor Kota (Polresta), sebagai berikut :

1. Polresta Bandung Barat, yang membawahi 8 Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), yakni :
   1) Polsekta Andir
   2) Polsekta Cicendo
   3) Polsekta Sukasari
   4) Polsekta Astana Anyar
   5) Polsekta Bandung Kulon
   6) Polsekta Babakan Ciparay
   7) Polsekta Bojongloa Kidul
   8) Polsekta Bojongloa Kaler

2. Polresta Bandung Tengah, yang embawahi 9 Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), yakni :
   1) Polsekta Regol
   2) Polsekta Cidadap
   3) Polsekta Coblong
   4) Polsekta Lengkong
   5) Polsekta Kiaracondong
   6) Polsekta Bandung Wetan
   7) Polsekta Sumur Bandung
   8) Polsekta Cibeunying Kaler
   9) Polsekta Cibeunying Kidul
3. Polresta Bandung Timur, yang membawahi 7 Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), yakni :
   1) Polsekta Cibiru
   2) Polsekta Rancasari
   3) Polsekta Antapani
   4) Polsekta Arcamanik
   5) Polsekta Buah Batu
   6) Polsekta Bandung Kidul
   7) Polsekta Ujung Berung

Kemudian ada perubahan nama Polsekta di wilayah Bandung Timur berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jabar No. Pol : Skep/567/VIII/2007 tanggal

28 Agustus 2007 tentang Perubahan Nama Polsek Jajaran Polda Jabar, sebagai berikut :

1. Nama “Polsek Kota Cicadas” berubah menjadi “Polsek Kota Antapani”.
2. Nama “Polsek Kota Margacinta” berubah menjadi “Polsek Kota Buah Batu”.

3.2.2 Visi Mapolwiltabes Bandung

Sesuai dengan Visi dan Misi Kapolda Jabar yang di Implementasikan pada pelaksanaan tugas dijajaran Polwiltabes Bandung adalah terwujudnya Postur Polri Polwiltabes Bandung yang profesional, bermoral dan modern serta dapat dipercaya masyarakat tahun 2014 juga dapat sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum secara mampu mendukung upaya Pemerintah Kota Bandung menjadi Kota yang termaju dan untuk mewujudkan cita-cita dimaksud maka Polwiltabes Bandung memberikan pelayanan prima dalam bentuk :

1. Perlindungan, pengayoman serta Pelayanan masyarakat secara mudah serta responsif untuk dukung Visi Pemerintahan Kota Bandung yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat) dengan memberantas penyakit masyarakat serta perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral, agama serta budaya masyarakat.
2. Penegakan Hukum yang Profesional dan Proporsional serta bermoral yang selalu menjunjung tinggi Supremasi Hukum dan HAM.

3. Perbaikan pola sikap dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan agar sekaligus dapat mendukung visi dari Pemerintah Kota Bandung yang aman, tertib dan disiplin masyarakatnya.
4. Meningkatkan Kinerja Anggota Polwiltabes Bandung agar lebih Profesional dan Proporsional sehingga dapat dipercaya dan didukung kuat oleh masyarakat dengan cara menyelesaikan semua perkara yang ditangani secara tuntas dan transparan.

3.2.3 Misi Mapolwiltabes Bandung

Mengacu pada kebijakan Kapolda Jabar dengan Motto sukses Polri, kepuasan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan masyarakat (Kat Yan Mas), maka Misi Polwiltabes Bandung dalam mewujudkannya adalah :

1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM anggota Polri maupun PNS Polwiltabes Bandung yang profesionalisme, bermoral dan modern melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh masing-masing fungsi.
2. Mengembangkan potensi keamanan melalui Perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara Polisi dan masyarakat pada Polres dan Polsek jajaran Polwiltabes Bandung.
3. Perlindungan, pengayoman serta Pelayanan masyarakat secara mudah serta responsif untuk dukung Visi Pemerintahan Kota Bandung yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat) dengan

memberantas penyakit masyarakat serta perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral, agama serta budaya masyarakat.

4. Penegakan Hukum yang Profesional dan Proporsional serta bermoral yang selalu menjunjung tinggi Supremasi Hukum dan HAM.
5. Perbaikan pola sikap dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan agar sekaligus dapat mendukung visi dari Pemerintah Kota Bandung yang aman, tertib dan disiplin masyarakatnya.
6. Meningkatkan Kinerja Anggota Polwiltabes Bandung agar lebih Profesional dan Proporsional sehingga dapat dipercaya dan didukung kuat oleh masyarakat dengan cara menyelesaikan semua perkara yang ditangani secara tuntas dan transparan.
7. Melaksanakan pengembangan strategi keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini dan cipta kondisi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.
8. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk ikut memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polwiltabes Bandung.
9. Meningkatkan kerjasama dengan semua pihak dalam rangka mewujudkan dukungan positif dari semua pihak.

3.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Mapolwiltabes Bandung

Tugas Pokok Mapolwiltabes Bandung dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Mapolwiltabes Bandung lainnya dalam daerah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Mapolwiltabes Bandung.

1. Pemberian Pelayanan kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan serta permintaan bantuan/pertolongan, layanan pengaduan atas tindakan anggota Polri serta pelayanan surat-surat ijin/keterangan, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi.
2. Intelijen dalam bidang keamanan termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi serta fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum.
4. Kesamaptaan Kepolisian yang meliputi kegiatan Patroli, Pengaturan, Penjagaan dan Pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan terhadap tindak pidana ringan dan pengamanan unjuk rasa serta pengendalian massa dan pengamanan obyek khusus yang meliputi VVIP/VIP, Pariwisata serta obyek vital/khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan kamtibmas.

5. Lalu Lintas Kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran serta penyidikan kecelakaan lalu lintas dan registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas.
6. Kepolisian Perairan yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai/perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
7. Bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan/ pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dalam rangka menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban sehingga terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian.
8. Pembinaan Kemitraan yang meliputi kerja sama dengan organisasi / lembaga / tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan fungsi bimbingan masyarakat, kerjasama dengan pemerintah daerah dalam kontek otonomi daerah serta pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan terhadap Kepolisian Khusus dan penyidik pegawai negeri sipil.
9. Fungsi-fungsi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga

masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.

3.3 Bagian Operasi Mapolwiltabes Bandung

Bag-ops adalah unsur pembantu pembantu pimpinan dan pelaksana staf Mapolwiltabes yang berada dibawah pimpinan Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Bandung. Bag-ops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian pelaksanaan operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas perlindungan saksi / korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses pengadilan dan pengamanan khusus lainnya.

Bag-ops dipimpin oleh kepala bagian operasional (Kabag Ops) yang bertanggung kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resor (Waka Polres). Kabag Ops dalam melaksakan tugas kewajibannya dibantu oleh:

1) Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional (Kasubag Bin Ops);
2) Kepala Sub Bagian Tahanan (Kasubag Wattah); dan
3) Unit-unit pelayanan (Unit SPK) yang berada dibawah Kabag Ops.
4) *Emergency Call Center* 112

3.3.1 Sub Bagian Pembinaan Operasional (Sub Bagbin Ops)

Sub bagbin ops adalah unsur staf pada Bag-ops Mapolwiltabes yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan data / informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas operasional di lingkungan Mapolwiltabes dan pelayanan di lingkungan Bag-ops Mapolwiltabes. Bagian pembinaan operasional dipimpin oleh Kasubag Bin Ops yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kabag Ops Mapolwiltabes.

Kasubag Bin Ops dalam melaksanakan tugas tersebut dibantu oleh Bagian Data Adminstrasi (Bamin) yang pelaksaan tugas sehari-hari oleh unsur Bantuan Umum (Banum) dari BA/PNS dengan tugas sebagai berikut:

1) Melaksanakan pengumpulan, penelitian dan penyusunan informasi yang diterima dari siaga Ops untuk dijadikan sebagai data khusus yang segera dapat disajikan kepada pimpinan, disajikan sebagai bahan visualisasi *display* (data) dalam komputer. Adapun pelaksaan tugas pokok Bamin adalah sebagai berikut:
    a) Menerima data gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dari jajaran Polresta yang dikumpulkan melalui format GK lengkap, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat diadikan data gangguan kamtibmas skala Regional bahkan Nasional;
    b) Hasil-hasil penelitian jurnal harian dan hasil rekapitulasi data gangguan kamtibmas mingguan disusun menjadi data / statistik mingguan ataupun data / statistik yang dituangkan dalam bentuk-bentuk visualisasi untuk disajikan, khususnya untuk pimpinan.

c) Laporan bulanan Bag-ops kewilayahan dan laporan kamtibmas lainnya yang diterima melalui jalur administrasi dan komunikasi disusun berdasarkan disposisi pimpinan menjadi data / statistik bulanan Bag-ops Mapolwiltabes Bandung dan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visualisasi untuk penyajian.

2) Mempelajari dan meneliti jurnal harian yang sudah di disposisi oleh pimpinan;

3) Membuat statistik dan mmenyajikan data / informasi operasional guna menunjang tugas operasial serta sebagai pertimbangan kebijaksanaan pimpinan.

3.3.2 Sub Bagian Tahanan (Subbag Wattah)

Subbag Wattah merupakan unsur staf pada Bag-ops Mapolwiltabes Bandung yang bertugas menyelenggarakan tentang perawatan tahanan yang meliputi har makan, har kesehatan, har kebersihan ruang tahanan dan pemeliharaan lainnya yang berkaitan dengan kelangsungan tahanan. Serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabag Ops Mapolwiltabes Bandung, hal yang menyangkut anggaran Pemeliharaan Perawatan Tahanan (P2T) diperoleh dari Jubar Mapolwiltabes Bandung per-triwulan.

3.3.3 Unit-unit pelayanan (Unit SPK)

Unit SPK merupakan staf pada Bag-ops Mapolwiltabes yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat berupa laporan / pengaduan serta mendatangi Tempat Kejadian Tindak Pidana (TKTP) bilamana terjadi tindak pidana atau kasus lainnya yang memerlukan kehadiran polisi. Tugas dari unit SPK adalah:

1) Menyajikan laporan berupa harian situasi (Lapsit) kamtibmas selama 1 x 24 jam kepada pimpinan;
2) Memonitoring situasi kamtibmas selama 1 x 24 jam kepada jajaran Mapolwiltabes Bandung.
3) Melaksanakan pengendalian kegiatan unit-unit operasional di lapangan.

3.3.4 *Emergency Call Center* 112

Merupakan unsur staf pada Bag-ops Mapolwiltabes yang bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengendalian situasi, khususnya situasi lalu lintas selama 1 x 24 jam, dan beritanya dilanjutkan kepada fungsi Lalu Lintas (Lantas). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta meningkatkan bidang pelayanan masyarakat, maka Bag-Ops Mapolwiltabes mengembangkan jaringan SMS 9123 dan *Global Positioning System* (GPS) untuk monitoring unit-unit patrol R4 di lapangan. Adapun tugas dari *emergency call senter* yaitu:

1) Membuat laporan *emergency* dari masyarakat tentang kemungkinan terjadinya kasus tindak pidana dan lainnya yang memerlukan kehadiran

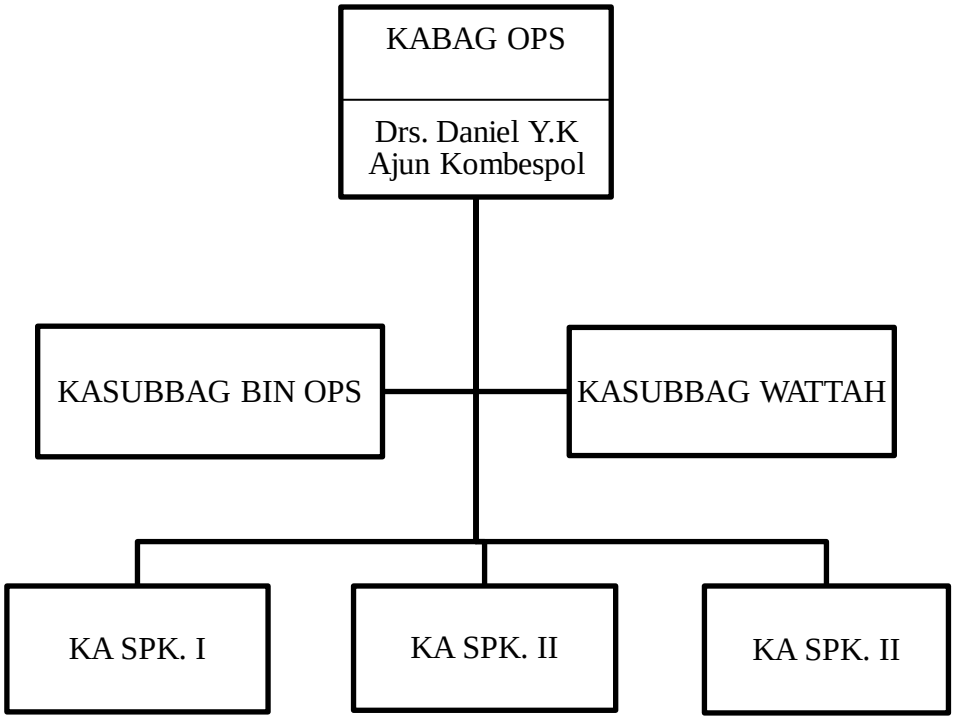
polisi, selanjutnya berita tersebut diteruskan kepada fungsi operasional yang bersangkutan.

2) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas selama 1 x 24 jam kepada pimpinan.

3.4 Struktur Organisasi Sentral Pelayanan Kepolisian Bag-ops

Struktur organisasi berdasarkan SKEP Kapolri No. Pol.: SKEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang validasi satuan Polri.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi



(Sumber: Hubungan Tata Kerja (HTC) Bag-Ops Mapolwiltabes Bandung)

Berdasarkan data tersebut, dalam menjalankan tugasnya kabag dibantu oleh 2 orang kasubbag, yakni kasubbag wattah yang mempunyai tugas dan

wewenang untuk menyelenggarakan tentang perawatan tahanan yang meliputi har makan, har kesehatan, har kebersihan ruang tahanan dan pemeliharaan lainnya yang berkaitan dengan kelangsungan tahanan serta kasubbag bin ops yang mempunyai tugas dan kewenangan menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan data / informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas operasional di lingkungan Mapolwiltabes dan pelayanan di lingkungan Bag-ops Mapolwiltabes.

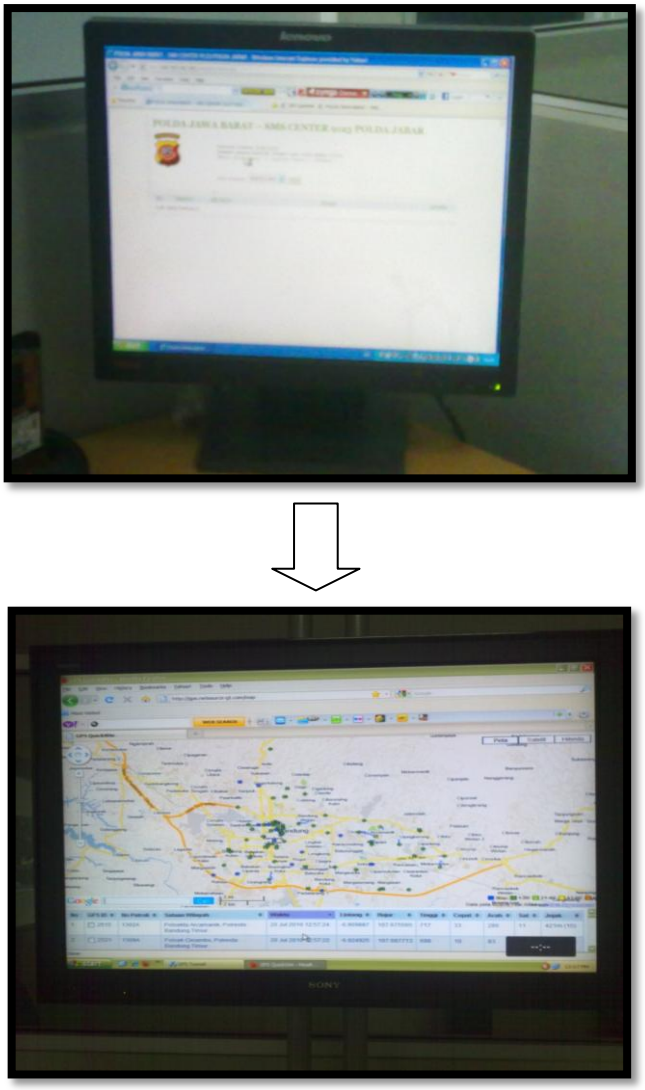
3.5 Gambaran Umum Sistem Informasi *Short Message Service Gateway* di Mapolwiltabes Bandung

Implementasi kebijakan SISMS *Gateway* di wilayah kerja Mapolwiltabes Bandung dilakukan melalui sistem *online* antara instansi terkait yang berada di wilayah tempat kejadian perkara (TKP) dalam hal ini adalah kantor kepolisian sektor (Polsek). Pembagian kerja ini dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan, mempersingkat waktu dan efisiensi kerja dari para aparat di Polsek setempat. Tarif yang dikenakan untuk setiap pengiriman pesan ke SISMS *Gateway* adalah tarif yang berlaku pada jaringan operator masing-masing pengguna telepon seluler.

Kegunaan praktis dari sistem ini bagi masyarakat di antaranya: mempermudah sistem pelaporan untuk kondisi darurat yang lebih baik dari sebelumnya dan dapat membantu meningkatkan kinerja aparat kepolisian, masalah efisiensi waktu, tenaga, dan sumber dana. Kegunaan bagi pihak

kepolisian dari sistem ini adalah untuk mempermudah mengetahui tempat kejadian perkara. Pengembangan SISMS *Gateway* bertujuan untuk melakukan korelasi data untuk menghasilkan data baru hasil korelasi. Pada sistem yang terpasang saat ini, arsitektur lalu lintas data melalui SMS sudah terjalin cukup baik.

Gambar 3.3
Monitor SMS Gateway dan SIG

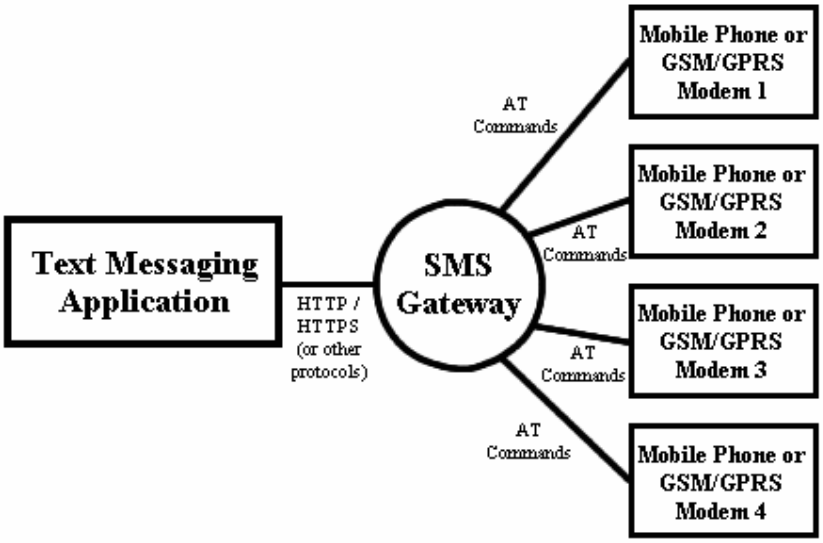


(Sumber: SPK Bag-Ops Mapolwiltabes)

Berdasarkan gambar tersebut, pengguna (korban) mengirimkan pesan singkat dengan format: <JenisKejahatan> Spasi <LokasiKejadian> lalu akan dikirimkan melalui terminal bergeraknya. Prosesnya adalah sebagai berikut :

1) SMS dari korban diterima oleh ponsel penerima;
2) SMS dari korban yang ada dalam ponsel penerima diambil oleh GPS untuk diketahui kebenaran lokasi korban, lalu kalau lokasi korban benar akan diambil oleh SISMS *Gateway*;
3) SMS dari korban yang ada dalam SISMS *Gateway* diambil oleh program pelaporan keadaan darurat;
4) Program pelaporan keadaan darurat melakukan *query* ke basis data berdasarkan isi SMS dari pengguna dan akan ditampilkan peta *digital* lokasi kejadian yang menimpa korban;
5) Hasil *query* basis data diambil oleh program pelaporan keadaan darurat;
6) Hasil *query* basis data yang telah diproses oleh program pelaporan keadaan darurat, dikirimkan ke Sistem Informasi SMS *Gateway*;
7) SMS *Gateway* mengirimkan hasil *query* yang telah diproses ke ponsel penerima;
8) Ponsel penerima mengirimkan SMS balasan yang berisi informasi mengenai tindak lanjut pihak kepolisian dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
9) Ponsel korban menerima SMS balasan yang berisi informasi mengenai tindak lanjut pihak kepolisian dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Gambar 3.4
System Default Reply

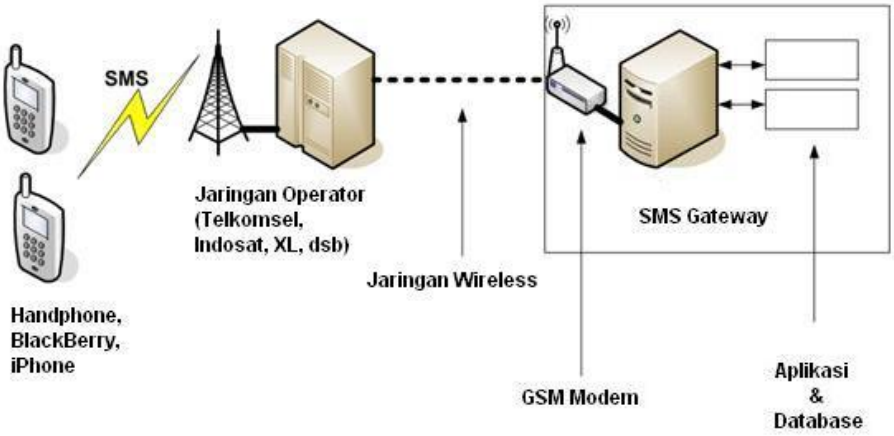


(Sumber : Ragam Info, Melalui http://ragaminfo.com//SMS *Gateway*)

Berdasarkan gambar di atas, cara kerja *system default reply* pada SISMS *Gateway* :

1) Nomor ponsel pengirim dan pesan SMS yang diterima oleh SMS *Gateway* akan dimasukkan ke tabel *message*,
2) SMS *Gateway* akan memproses pengambilan data dari *database* sesuai dengan format yang telah ditentukan pada sistem,
3) Apabila format SMS yang diterima tidak sesuai dengan *database* maka sistem akan mengirimkan pesan gagal kepada penerima, jika sesuai SMS *Gateway* akan mengirimkan SMS balasan kepada *user* yang mengirimkan SMS.

Gambar 3.5
Proses SISMS *Gateway*



(Sumber : Ragam Info, Melalui http://ragaminfo.com//SMS *Gateway, modifikasi*)

Berdasarkan data tersebut, dapat diungkapkan cara kerja dari SMS *Gateway* adalah sebagai berikut:

1) *User* mengirimkan pesan dengan format tertentu ke nomor informasi melalui jaringan *provider* sesuai dengan jaringan yang digunakan,
2) Melalui jaringan *provider*, pesan dari *user* akan dikirimkan melalui jaingan *wireless* ke nomor informasi,
3) SMS Gateway menerima pesan yang dikimkan melalui GSM modem yang terhubung dengan sistem *GPS*, kemudian dilakukan pengecekan apakah data yang diterima sesuai dengan format pengiriman atau tidak,
4) Setelah proses pengecekan dilakukan, maka data yang sesuai dengan format akan diterima akan diproses untuk mengambil data yang ada di *database* sesuai dengan permintaan.
5) Setelah semua data diproses, maka SMS *Gateway* akan mengirimkan SMS balasan tentang informasi yang diinginkan oleh *user*.